



KINK KUSUMA REIN (TEMPO)

Perumahan Prajurit

Panglima Kodam VII Wirabuana Mayor Jenderal Amril Amir meletakkan batu pertama pembangunan perumahan prajurit di Kariango, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, kemarin. Perumahan yang diperuntukkan bagi prajurit TNI AD tersebut merupakan perumahan non-dinas.

Pelapor Anggap Penjualan Hotel Aston Tak Beres

MAKASSAR — Lembaga Investigasi dan Monitoring (Limit) menilai penjualan Hotel Aston—kini berganti nama menjadi Hotel Banua—tidak beres. “Tidak ada transparansi mengenai penjualan aset di bawah tangan yang dilakukan atas sepengetahuan BNI,” ujar Mamat Sanrego, Ketua Limit Sulawesi Selatan, kemarin.

Lembaga ini melaporkan kasus penjualan Hotel Aston, yang melibatkan bank milik pemerintah, yaitu Bank Negara Indonesia (BNI), kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada Maret lalu. Menurut Mamat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, penyertaan modal BNI kepada debitor hanya lima tahun.

Pada 1998, Bank Indonesia menemukan pemberian fasilitas kre-

dit BNI kepada PT Gloria Megah Sakti Perkasa senilai Rp 6,85 miliar untuk pembelian hotel di Jalan Haji Bau itu. “Aturannya harus dilelang, apa pun alasannya. Meski nilainya jauh di bawah standar yang diinginkan pemiliknya, harus dilelang,” kata Mamat. Dia juga telah melaporkan kasus ini kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 14 Mei 2010.

Saat dimintai konfirmasi, Daniel Sembiring, Kepala Subbagian Hukum dan Humas BPK Sulawesi Selatan, mengatakan sudah menerima surat tersebut. “Kami masih mempelajari dan kami memang punya kewenangan mengaudit perbankan milik BUMN. Tapi urusan ini diserahkan kepada BPK pusat,” kata dia.

Sebelumnya Analis Madya Bank Indonesia Abdul Malik mengata-

kan. “Prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit tidak terpenuhi sepenuhnya,” ucap dia. “Kami masih dalam, terutama pada transaksi di bawah tangan yang dilakukan pihak pertama atas sepengetahuan BNI,” dia menambahkan.

Sampai saat ini kasus penjualan Hotel Aston yang melibatkan BNI dan pemilik hotel, Samuel Suwandi, masih dalam penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Subair Djasmir, Kepala Sentra Kredit BNI Makassar, mengaku siap diperiksa.

“Saya berharap aparat dapat mengungkap kebenaran, dan tujuan oknum di balik kasus ini. Termasuk siapa saja sponsor unjuk rasa yang selama ini berlangsung di BNI,” kata dia dalam pesan pendeknya kepada *Tempo* kemarin.

● ICHSAN AMIN

Guru yang melapor mendapat ancaman.

Wali Kota Didesak Copot Kepala SMA 2

MAKASSAR — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar mendesak Wali Kota segera mencopot Kepala Dinas Pendidikan Makassar Mahmud B.M. dan Kepala SMA Negeri 2 Makassar Abdul Wahab. Keduanya dianggap paling bertanggung jawab atas kasus pengantoran nilai siswa baru yang diterima di sekolah unggulan itu.

“Ini sekaligus untuk memperlancar pengusutan kasus. Kedua pejabat itu mesti dicopot dulu,” kata Abdul Kadir, Koordinator Bidang Sosial LBH Makassar, kemarin.

Kadir mengatakan, Supardin, guru pembongkar perkara curang dalam penerimaan siswa baru, seharusnya men-

dapat perlindungan. Yang dialami Supardin, kata dia, justru sebaliknya. “Ia mendapat ancaman setelah membocorkan kasus tersebut ke publik,” ungkapnya.

Supardin adalah guru sekolah yang membeberkan dugaan penyimpangan panitia penerimaan siswa baru SMA Negeri 2. Modusnya dengan mengontrol nilai ijazah siswa yang tidak lulus seleksi sehingga memenuhi syarat minimal untuk diterima.

Senin lalu, Supardin mengadukan berbagai ancaman kepada kantor LBH Makassar di Jalan Singa. Menurut dia, ancaman itu datang dari kantor Dinas Pendidikan Makassar. “Saya akan dipecah,”

kata guru mata pelajaran fisika di SMA Negeri 2 itu.

Menurut Kadir, lembaga-nya akan mengirimkan surat ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Jakarta. “Agar ancaman dan tekanan kepada Supardin bisa dihindari,” kata dia.

Wali Kota Ilham Arief Sirajuddin, kata dia, akan didesak mencopot Mahmud dan Abdul Wahab. Kasus penyimpangan ini telah mencederai pendidikan. “SMA Negeri 2 hanya satu contoh, sekolah lain perlu dicek.”

Komisi Bidang Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar mendesak dibentuk tim investigasi kasus SMA Negeri 2. “Kami sudah meng-

usulkan untuk membuat tim investigasi,” kata Iqbal Abd. Jalil, anggota komisi itu, kemarin.

Mahmud mengatakan sudah menempuh sejumlah langkah untuk mengatasi kasus ini. Di antaranya berkecukupan surat ke Wali Kota dan ke Inspektoral. Isi surat tersebut mengenai perlunya memeriksa Kepala SMA Negeri 2 Makassar Abdul Wahab. “Surat itu kami kirimkan Jumat lalu,” ujar dia.

Sebelumnya, Abdul Wahab mengatakan tidak tahu adanya penggelembungan nilai ijazah. Dia juga tidak yakin cara tersebut dilakukan oleh panitia seleksi. “Saya tidak tahu ada perubahan nilai,” kata dia. ● INDRYA OY | KAMILIA

Kasus Bupati Toraja Segera Dilimpahkan

MAKASSAR — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat segera melimpahkan berkas perkara Bupati Tana Toraja Johannes Amping Sitoru dalam kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2005 sebesar Rp 1,9 miliar. Langkah ke pengadilan.

“Kami sudah menerima surat pemberitahuan dari Kejaksaan Tinggi tentang rencana pelimpahan berkas kasus itu ke penuntutan,” kata Didi Haryono, pelaksana tugas Kepala Kejaksaan Negeri Ma-

kassar, kemarin.

Apabila berkas Amping sudah di tangan Kejaksaan Negeri, dia secepatnya memproses dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar. “Ada kemungkinan pekan ini berkas perkara itu kami terima,” ujar dia.

Amping Sitoru diduga menyalahgunakan dana untuk bantuan dana penghubung ke pemerintah pusat dan daerah, bantuan pembinaan untuk partai politik, dan bantuan dana kemasyarakatan. Kasus ini juga menjerat Wakil Bupa-

ti Tana Toraja A.P. Popang dan mantan Wakil Bupati Tana Toraja Palimbong.

Amping pernah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi, bahkan sempat ditahan pada pertengahan 2007. Amping bebas setelah memenangkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar. Penahanan Amping dianggap tidak sah karena tidak seizin Presiden.

Setelah Kejaksaan Tinggi meminta izin Presiden, pemeriksaan bisa dilakukan sete-

lah 60 hari surat diajukan. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat Adjat Sudrajat sebelumnya akan mengecek nasib surat izin pemeriksaan Amping ke Sekretariat Negara.

Kalau surat belum juga ada, kata Adjat, kasus Amping diselesaikan setelah jabatannya berakhir. Jabatan Amping sebagai bupati akan ditanggalkan setelah seluruh rangkaian proses pemilihan kepala daerah selesai beberapa bulan ke depan. ● TRI SUHARMAN



SEMINAR TERDAHSYAT



7 Keajaiban Rezeki

Dalam 99 Hari Dengan OTAK KANAN Rezeki Bertambah, Nasib Berubah

Sabtu 7 Agustus 2010
Hotel Boulevard - Panakkukang
Jl. Boulevard Panakkukang F.37-48 Makassar
Pukul 09.00 wita - selesai

Melipatgandakan **MOTIVASI** dan keyakinan hingga 300 persen Mengubah kelemahan menjadi kekuatan tak terkalahkan Menemukan kekuatan yang menghasilkan dan membahagiakan Mengaktifkan **OTAK KANAN** dan **KREATIFITAS** Mengaktifkan intuisi bisnis kurang dari 1 detik Mempercepat terjadinya **Law of Attraction** dan impian Dan Teknik-teknik mutahir lainnya

PEMBICARA :
Ippho “Right” Santosa

INVESTASI

1. VIP	: Rp 250.000,-
2. UMUM	: Rp 150.000,-
3. Mahasiswa	: Rp 100.000,-

CONTACT PERSON
Aribah : 085 2420 888 49
Sekretariat :
Jl. Sultan Alauddin No. 250 Makassar

